PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
RSUD KRT. SETJONEGORO
Jl. Setjonegoro Nomor 1 Wonosobo Jawa Tengah 56311
Telepon (0286) 321091 / Faksimile (0286) 323873
E mail : rsudsetjonegoro@yahoo.co.id
Website : rsud.wonosobokab.go.id

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

# UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

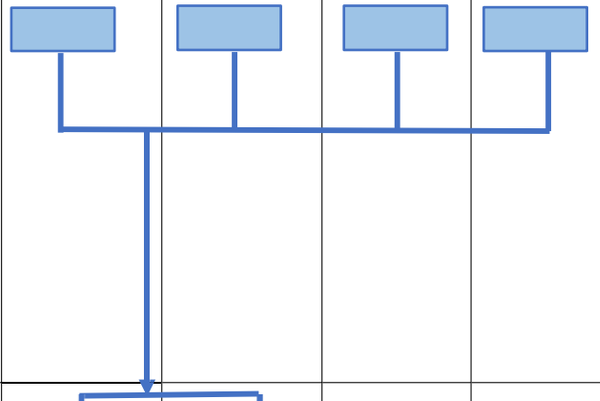
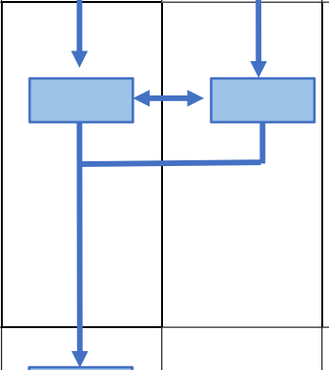
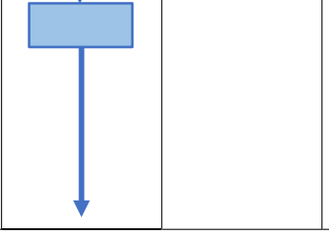
Jalan Setjonegoro No. 1 Wonosobo

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**RSUD KRT. SETJONEGORO**
Jl. Setjonegoro Nomor 1 Wonosobo Jawa Tengah 56311
Telepon (0286) 321091 / Faksimile (0286) 323873
E mail : rsudsetjonegoro@yahoo.co.id
Website : rsud.wonosobokab.go.id

| | |
|---|---|
| Nomor SOP | 445/1220.1/IX/2025/RSUD |
| Tanggal Pembuatan | 17 September 2025 |
| Tanggal Revisi | - |
| Tanggal Pengesahan | 17 September 2025 |
| Disahkan oleh | Plt. Direktur RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo<br>Selaku Atasan PPID Pelaksana,<br>**dr. R. Danang Sananto Sasongko, MM**<br>NIP. 19691206 200701 1 009 |
| Judul SOP | Uji Konsekuensi Informasi Publik |

| Dasar Hukum | Kualifikasi pelaksana |
|---|---|
| 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<br>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.<br>3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<br>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar LayananInformasi Publik. | 1. Minimal D3<br>2. Menguasai Tata Pembukuan<br>3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima<br>4. Memiliki Tata Krama |
| **Keterkaitan** | **Peralatan/perlengkapan** |
| Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah | 1. Formulir isian<br>2. Komputer<br>3. Pesawat Telepon<br>4. Jaringan Internet<br>5. ATK |
| **Peringatan** | **Pencatatan dan pendataan** |
| 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik<br>2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai<br>3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif<br>4. Sebelum adanya permintaan informasi publik PPID dapat melakukan pengujian secara proaktif terhadap informasi yang dinilai berpotensi dikecualikan, sebelum ada permohonan dari masyarakat.<br>5. Pada saat adanya permintaan informasi publik, ketika ada permohonan informasi dari pemohon, PPID dapat melakukan uji konsekuensi untuk menentukan apakah informasi tersebut dapat dibuka atau harus dikecualikan.<br>6. Pada saat penyelesaian sengketa informasi public. Jika terjadi sengketa dan Majelis Komisioner memerintahkan, PPID dapat melakukan uji konsekuensi untuk menentukan status informasi. | Dicatat pada register rekap informasi |

# ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA RSUD KRT.SETJONEGORO

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | Pendukung | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PPID Pelaksana | Atasan PPID Pelaksana | Bidang dan Bagian | PPID Kapupaten | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan:<br>a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang memuat informasi yang akan dikecualikan;<br>b. mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;<br>c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;<br>d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.<br>Uji konsekuensi dilakukan tiga tahap :<br>1. Sebelum ada permohonan informasi<br>2. Pada saat ada permohonan informasi<br>3. pada saat penyelesain sengketa |  | | | | 1. UU No. 14 Tahun 2008<br>2. PP 61 Tahun 2010<br>3. Perki No. 1 Tahun 2021 | Pada hari dan jam kerja | Dokumen daftar informasi publik yang dikecualikan | |
| 2. | Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi. |  | | | | 1. UU No. 14 Tahun 2008<br>2. PP 61 Tahun 2010<br>3. Perki No. 1 Tahun 2021 | Pada hari dan jam kerja | Lembar Pengujian Konsekuensi | |
| 3. | Menetapkan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan paling sedikit memuat:<br>a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;<br>b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;<br>c. uraian yang jelas dan terang tentang informasi yang dikecualikan;<br>d. alasan pengecualian;<br>e. jangka waktu pengecualian;<br>f. tempat dan tanggal penetapan. |  | | | | 1. UU No. 14 Tahun 2008<br>2. PP 61 Tahun 2010<br>3. Perki No. 1 Tahun 2021 | Pada hari dan jam kerja | Dokumen klasifikasi informasi yang dikecualikan | |
| 4. | Menetapkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi dan Berita acara atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan |  | | | | Alat tulis kantor | Pada hari dan jam kerja | Lembar Pengujian Konsekuensi dan Berita acara atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | Pendukung | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PPID Pelaksana | Atasan PPID Pelaksana | Bidang-Bagian | PPID Provinsi | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 5. | Menetapkan surat keputusan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan | | | | | Alat tulis kantor | Pada hari dan jam kerja | Surat Keputusan daftar informasi publik yang dikecualikan ditandatangani Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik | |
| 6. | Mengunggah daftar informasi publik yang dikecualikan ke website resmi RSUD KRT.Setjonegoro maupun melalui sarana informasi lainnya | | | | | Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh RSUD KRT.Setjonegoro | Setelah daftar informasi publik yang dikecualikan ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik | Adanya konten daftar informasi publik yang dikecualikan di website RSUD Krt.Setjonegoro. | |
| 7. | Menyampaikan daftar informasi publik yang dikecualikan yang telah ditetapkan Pimpinan Badan Publik kepada PPID Kabupaten untuk ditetapkan menjadi bagian dari daftar informasi publik yang dikecualikan PPID Kabupaten. | | | | | | Setelah daftar informasi publik yang dikecualikan ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik | | |

Plt. Direktur RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo
Selaku Atasan PPID Pelaksana,

**dr. R. Danang Sananto Sasongko, MM**
NIP. 19691206 200701 1 009